

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)



LAPORAN KINERJA

STASIUN PSDKP CILACAP

TAHUN **2025**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**KKP
2025**

panganbiru

08
PRIORITY SERVICE

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

STASIUN PSDKP CILACAP

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Stasiun PSDKP Cilacap pada Tahun Anggaran 2025 dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsi yang diamanahkan dengan baik. Stasiun PSDKP Cilacap dengan wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan meliputi WPP 712 dan WPP 573, serta wilayah administrasi provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja pencapaian indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk menunjukkan pencapaian indikator kinerja dimaksud, maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai gambaran pertanggungjawaban pemenuhan kinerja, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan ini disusun juga sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Selanjutnya, sebagai langkah peningkatan kinerja, maka kami berharap saran dan masukan baik dari internal Stasiun PSDKP Cilacap maupun pihak eksternal. Selain itu, diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyempurnaan kegiatan pada masa yang akan datang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan dan pencapaian target pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Tahun Anggaran 2025 ini.

Cilacap, 13 Januari 2026

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap

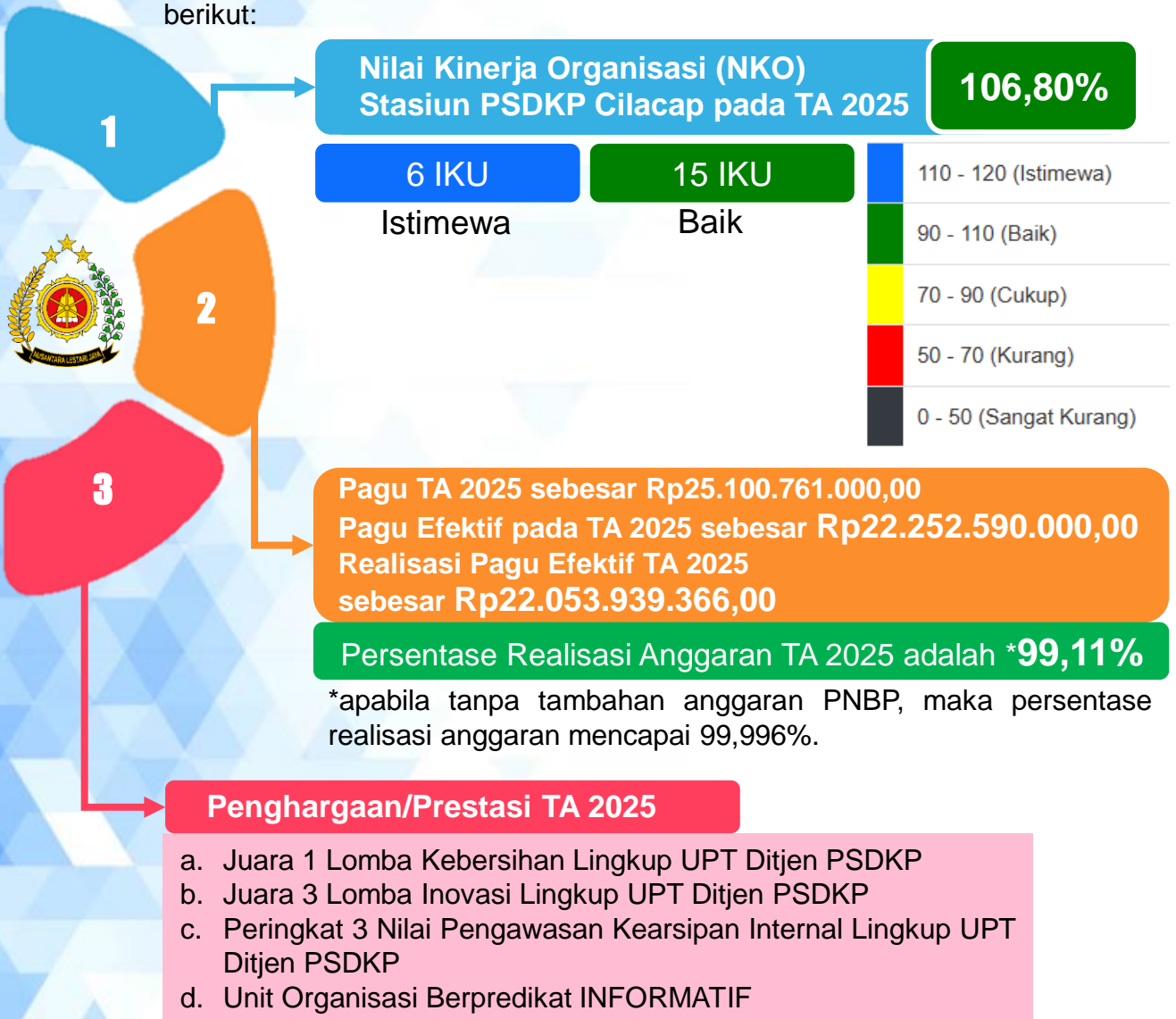


Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19840309 200801 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Berdasarkan perjanjian dimaksud, terdapat **9 Sasaran Strategis** yang menjadi acuan Stasiun PSDKP Cilacap dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis tersebut, yang diukur dengan **21 Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Selanjutnya berdasarkan capaian pada aplikasi kinerjajaku, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Program Setditjen PSDKP semuanya **telah terealisasi dengan nilai capaian terhadap 21 IKU** sebagai berikut:



Selanjutnya berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2025, dapat dipergunakan untuk memaksimalkan capaian dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya, khususnya dalam perencanaan tahun anggaran 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

2

RINGKASAN EKSEKUTIF

3

BAB 1 PENDAHULUAN

5

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

9

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

13

3.1 Capaian Kinerja

14

a. Target dan Realisasi Tahun 2025

15

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya

37

c. Perbandingan Realisasi dengan Rencana Strategis

38

d. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Unit Kerja Lain

39

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja

40

f. Analisis Efisiensi Sumberdaya

41

g. Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

42

3.2 Realisasi Anggaran

43

BAB 4 PENUTUP

44

BAB 5 LAMPIRAN

45

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan



BAB 1 PENDAHULUAN



PENJELASAN UMUM ORGANISASI

01

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Cilacap menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

02

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan

kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah menerbitkan Surat Tugas (ST) yang berkaitan dengan pembagian susunan keanggotaan tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan surat tugas tersebut struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi (1)Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen; (2)Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; (3)Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP; (4)Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK; (5)Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas; serta (6)Anggota Tim Kerja yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional.

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun PSDKP Cilacap untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.



DWI SANTOSO WIBOWO, S.St.Pi, M.Pi
Kepala Stasiun PSDKP Cilacap

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.



ADIA CANDRA, S.AP, M.PA
Kepala Urusan Umum
Stasiun PSDKP Cilacap



PRABOWO, S.St.Pi
Katimja Sarpras dan
Operasional KP



SUMARGONO, S.Pi
Katimja
Intelwas SDK



YOGI PUTRANTO, S.Si, M.Pi
Katimja
Intelwas SDP



M. HAFIZ, S.St.Pi, MH
Katimja
Penanganan Pelanggaran

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas.

Melakukan pengawasan pada sektor pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatan sumber daya kelautan termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi, serta kerusakan atau pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

Melakukan pengawasan pada sektor pemanfaatan sumber daya ikan (kegiatan penangkapan, budidaya, pengolahan, distribusi, pemasaran, JIL dan/atau Appendik CITES, *destructive fishing* dan fasilitasi Pelayanan Publik Penerbitan SLO).

Melakukan penyelenggaraan administrasi dan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang, serta sanksi administratif.

Pada tahun 2025 terdapat isu aktual yang telah terjadi di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap baik karena adanya implementasi regulasi baru atau kondisi di lapangan, sebagai berikut:

03

Isu Aktual

1 Kapal-kapal < 30 GT dengan izin Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penangkapan ikan di atas 12 mil yang seharusnya berada di bawah 12 mil. Kondisi ini ditindaklanjuti dengan proses migrasi kapal perikanan dari Izin Pemerintah Daerah menjadi Izin Pemerintah Pusat. Namun, untuk wilayah Selatan pulau Jawa terdapat kendala kapal tradisional yaitu dengan sistem pembekuan menggunakan balok es setelah migrasi menjadi Izin Pusat, ketika musim Barat masih mencari ikan di bawah 12 mil yang memerlukan regulasi pengaturan lebih lanjut.

2 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada tanggal 5 Juni 2025 masih menjadi isu aktual, mengingat adanya perubahan beberapa kewenangan penerbitan dan pengawasan perizinan berusaha dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, namun belum ada peraturan pelaksanaan dalam kegiatan pengawasannya, serta beberapa perubahan dan/atau pengaturan terkait tarif atau nilai sanksi denda administratif atas pelanggaran sektor kelautan dan sektor perikanan.

3 Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya pasca pelaksanaan Gerai Perizinan yang dilaksanakan di Kepulauan Karimunjawa - Jawa Tengah, belum dapat mengakomodir secara dominan pemanfaatan pulau kecil untuk memiliki rekomendasi atau izin pemanfaatan pulau kecil di Kepulauan Karimunjawa - Jawa Tengah, sehingga diperlukan keberlanjutan fasilitasi Gerai Perizinannya.

4 Tingginya intensitas pelayanan penerbitan SLO di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap bagian Utara (Satwas SDKP Pati dan Satwas SDKP Pekalongan), menyebabkan perlunya tambahan personel pengawas perikanan. Dalam hal ini Stasiun PSDKP Cilacap akan menerapkan mekanisme rotasi penugasan pengawas perikanan, utamanya pada pengawas perikanan yang bertugas di wilayah bagian Selatan (Satwas SDKP Trenggalek, Satwas SDKP Malang dan Stasiun PSDKP Cilacap) akan ditugaskan dalam rentang waktu tertentu untuk membantu pelayanan publik di wilayah bagian Utara.

5 Potensi kapal perikanan dengan ukuran di bawah 30 GT dengan izin daerah di wilayah Selatan Jawa yang masih beroperasi di atas 12 mil, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran DPI, untuk itu potensi pelanggaran tersebut harus dimitigasi dengan dukungan migrasi perizinan dari perizinan daerah ke perizinan pusat. Namun, proses pelaksanaan migrasi belum sepenuhnya dapat diterima oleh nelayan karena adanya kendala perbedaan karakteristik kapal perikanan, modal usaha, komoditas hasil tangkapan, subsidi bahan bakar minyak, harga acuan dan kondisi ekonomi di lapangan, dan terutama kewajiban pemasangan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA



2.1 ARAH KEBIJAKAN ORGANISASI

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029. Stasiun PSDKP Cilacap berupaya melaksanakan arah kebijakan Ditjen PSDKP berdasarkan Renstra 2025-2029 melalui Perjanjian Kinerja tahun 2025. Selain itu, dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap juga berupaya untuk mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Ekonomi Biru.

01

Ditjen PSDKP
2025 - 2029

02

Program
Ekonomi Biru



Program Ekonomi Biru tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem laut, namun juga mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:



Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound (SMART)*. Jumlah **Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2025 adalah 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama***.

Selanjutnya atas pengukuran tingkat capaian IKU di atas, dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Nilai pengukuran tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses pada [website www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)).

*perubahan perjanjian kinerja terakhir pada 15 Desember 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1 Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82
	2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	
2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
	3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
	4 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	
4 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
	5 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	
5 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
	7. Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100
	7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	
7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
	10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8 Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	81
	9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	
9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	71,5
	13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	92
	14. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)	81
	15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	86
	16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
	17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
	18. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	80
	19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	75
	20. Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)	77
	21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70



BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

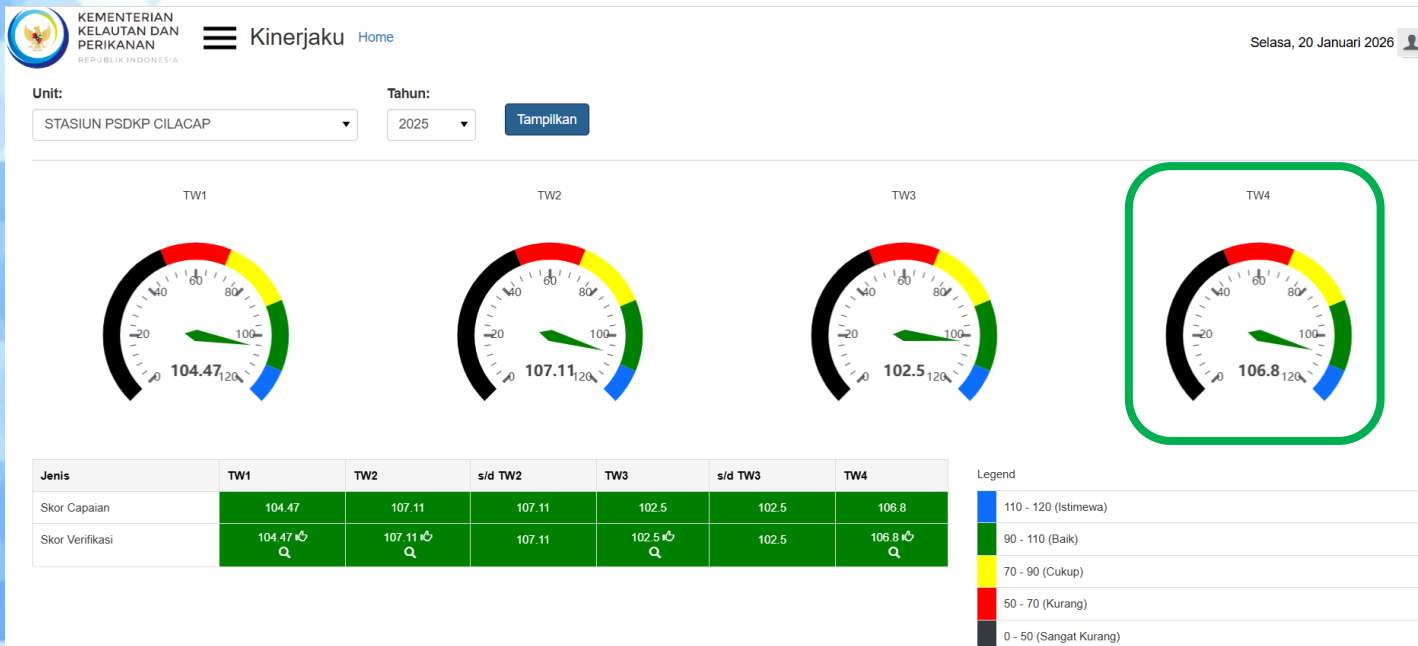


PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Pada tahun 2025 dengan 9 Sasaran Kegiatan yang memiliki 21 Indikator Kinerja Utama (IKU), Stasiun PSDKP Cilacap **berhasil merealisasikan seluruh target dengan nilai capaian di atas nilai target yang ditetapkan**, dengan hasil:

6 IKU memiliki nilai capaian 90 - <110 (baik); dan 15 IKU memiliki nilai capaian 110 – 120 (Istimewa).

Sehingga atas capaian ini, **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2025 adalah sebesar **106,8 (baik)** sebagaimana terlihat pada aplikasi kinerjaku berikut:



CAPAIAN KINERJA

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1 Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	100	120
	2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif			
2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100
	3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	100
3 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82	88,3	108
	4 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan			
4 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	100	120
	5 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif			
5 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas	92	96,8	105
	7. Indeks operasi speedboat pengawas	92	92,19	100
6 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	100	100
	7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			
7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	81	100
	10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	81	100
8 Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	81	81	100
	9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan			
9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	71,5	90,09	120
	13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	92	97,8	106
	14. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap	81	84,16	104
	15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	86	89,45	104
	16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
	17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	100	105
	18. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80	94,64	118
	19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap	75	92,5	120
	20. Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap	77	83,77	109
	21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	88,03	120

Rata-Rata Capaian Kinerja : 106,80

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif

Sasaran Kegiatan 1

IKU 1 - Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	82	100	120
--------	-----------	---------	----	-----	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	0*	3	Kelompok	*-

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP

Untuk kegiatan ini, ***terdapat revisi target dari 13 Pokmaswas yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP menjadi 0 (tanpa target/Kegiatan Pendukung dihapus) karena efisiensi anggaran**, yang telah dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA.REV11_Pemutahiran KPA) Tanggal 12 Desember 2025. Namun, pada Stasiun PSDKP Cilacap telah terealisasi 3 Pokmaswas yang dibina pada Semester I 2025. Informasi alokasi anggaran Pembinaan Pokmaswas sebesar Rp1.300.000.000,00, yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk Pembinaan Pokmaswas diefisiensi sebesar Rp1.300.00.000,00 atau 100%.

Meskipun kegiatan Pembinaan Pokmaswas diefisiensi 100%, namun pada tahun anggaran 2025 masih dapat **dilaksanakan pada 3 (tiga) Pokwaswas melalui Undangan dari Pokmaswas** dimaksud, untuk diberikan pemahaman dan didukung dengan lokasi kegiatan yang masih dekat dengan kantor Stasiun PSDKP Cilacap.

Tabel 1. Daftar Pokmaswas yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP

No	Nama Pokmaswas	Kota/Kab.	Lokasi Kegiatan	Tanggal	Bentuk Kegiatan
1	Linsangciwera	Kec. Gumelar - Banyumas	Desa Kedungurang	19 Januari 2025	Sosialisasi
2	Arus Lestari	Kec. Gumelar - Banyumas	Desa Kedungurang	19 Januari 2025	Sosialisasi
3	Kaliku	Kec. Rawalo - Banyumas	Desa Banjar Parakan	15 Mei 2025	Sosialisasi

Sehingga berdasarkan Manual IKU, Indeks yang dihitung dari penjumlahan Nilai Rencana kerja kegiatan pembinaan Pokmaswas (bobot 20%), Nilai Pendataan keaktifan Pokmaswas (bobot 30%), dan Nilai Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot 50%), dapat dihitung dengan **nilai Indeks: 100 (capaian rata-rata UPT lingkup Ditjen PSDKP)**, karena terdapat pemenuhan nilai dimaksud. Hasil capaian ini sama dengan realisasi tahun 2023 dan 2024 yaitu 100.

Realisasi anggaran untuk kegiatan kelompok masyarakat pengawas yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP adalah Rp0,00 atau tidak ada realisasi karena anggaran sepenuhnya diefisiensi.

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif

Sasaran Kegiatan 2

IKU 2 – Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (nilai)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	100	100	100
--------	-----------	---------	-----	-----	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	1	1	Operasi	100

Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan. Sedangkan nilai kualitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.

Pelaksanaan operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan dilaksanakan pada Triwulan III, dengan nilai informasi A1 – kriteria dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain (nilai 100), sehingga **Capaian IKU Nilai kualitas operasi intelijen kelautan adalah 100 (capaian rata-rata UPT lingkup Ditjen PSDKP)**, sesuai dengan formula perhitungan manual IKU sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right) = \frac{100}{1} = 100$$

Dimana:

- X : Nilai kualitas operasi intelijen kelautan
- Xi : Nilai data operasi intelijen kelautan
- n : Jumlah operasi intelijen kelautan

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan intelijen kelautan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp124.747.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk intelijen kelautan turut diefisiensi sebesar Rp104.242.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp20.505.000,00 atau 16,44% dari pagu total. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp20.505.000,00 atau 100%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif

Sasaran Kegiatan 2

IKU 3 – Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (nilai)

TARGET REALISASI CAPAIAN 100 100 100

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	1	1	Operasi	100

Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Sedangkan nilai kualitas adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen

Pelaksanaan operasi intelijen pengawasan sumber daya perikanan dilaksanakan pada Triwulan III, dan formula perhitungan manual IKU sebagai berikut:

$$Y_{koip} = (X_{tahap} * 0,7) + (X_{respon} * 0,3)$$

Dimana:

- Y_{koip} : Nilai kualitas operasi intelijen perikanan
- X_{tahap} : Diperoleh dari pemenuhan tahapan intelijen (perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian)
- X_{respon} : Diperoleh dari perbandingan operasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan hasil intelijen yang disampaikan

Dari pemenuhan persyaratan IKU dimaksud, maka diperoleh **Nilai kualitas operasi intelijen perikanan adalah 100 (capaian rata-rata UPT lingkup Ditjen PSDKP).**

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan intelijen perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp61.790.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk intelijen perikanan turut diefisiensi sebesar Rp24.136.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp37.654.000,00 atau 60,94% dari pagu total. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp37.652.500,00 atau 99,996%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

Sasaran Kegiatan 3

IKU 4 – Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (nilai)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
82	88,33	108

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	23	26	Lembaga	113

Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan, yang merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator yang diukur berdasarkan bobot tertentu, yaitu terdiri dari:

- Nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Bobot: 45%);
- Nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS (Bobot: 40%);
- Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental (Bobot: 15%).

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 26 Lembaga, dengan rincian 2 pengawasan rutin perizinan berusaha nilai 65, 17 pengawasan rutin KKPRL nilai 100 dan 7 pengawasan insidental nilai 100, sehingga **Capaian IKU Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah 88,83 (capaian rata-rata UPT lingkup Ditjen PSDKP yang tidak terdapat pengawasan OSS, namun lebih rendah daripada tahun sebelumnya/nilai 100)**, sesuai dengan formula perhitungan manual IKU sebagai berikut:

$$X = \frac{a+b+c}{3} = \frac{65+100+100}{3} = 88,33$$

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sektor kelautan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp238.000.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp110.984.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp127.016.000,00 atau 47,39% dari pagu total. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp127.014.992,00 atau 99,999%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

Sasaran Kegiatan 4

IKU 5 – Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (nilai)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	82	100	120
--------	-----------	---------	----	-----	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	21*	80	Lembaga	381

Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya

Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan nilai rata-rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan atau akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa, yaitu terdiri dari:

- a. Persiapan (Nilai 10);
- b. Pelaksanaan pemeriksaan (Nilai 70);
- c. Laporan hasil pengawasan (Nilai 20).

Untuk kegiatan ini, *terdapat revisi target dari 80 Lembaga menjadi 21 Lembaga, yang telah dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA.REV11_Pemutahiran KPA) Tanggal 12 Desember 2025.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 80 Lembaga, dengan rincian 18 pengawasan perizinan berusaha, 17 pengawasan importasi, 2 pengawasan *destructive fishing*, 37 pengawasan pemanfaatan SDP, dan 6 pengawasan atensi pimpinan, dengan keseluruhan tahapan yang sudah dilengkapi (*xpsp*) dan ditindaklanjuti (*xppus*). Sehingga **Capaian IKU Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan adalah 100 (capaian rata-rata UPT lingkup Ditjen PSDKP dan sama dengan tahun sebelumnya)**, sesuai dengan formula perhitungan manual IKU sebagai berikut:

$$ykpsdp = \frac{xpsp+xppus}{2} = \frac{100+100}{2} = 100$$

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sektor perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp800.000.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp519.238.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp280.762.000,00 atau 35,09% dari pagu total. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp280.684.500,00 atau 99,972%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif

Sasaran Kegiatan 5

IKU 6 – Indeks operasi kapal pengawas (indeks)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	92	96,8	105
--------	-----------	---------	----	------	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	10	60*	Hari Operasi	600

Operasi kapal pengawas

Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (bobot 40%). Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi;
2. Cakupan wilayah pengawasan (bobot 40%). Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPP NRI;
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (bobot 15%);
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (bobot 5%).

Untuk kegiatan ini, *Hari operasi tercapai 60 hari karena operasi kapal pengawas dilakukan dengan putaran mesin/RPM rendah sehingga hemat bahan bakar dan hari operasi dapat bertambah. Apabila menggunakan RPM tinggi maka target hari operasi tidak akan tercapai.

Selanjutnya melalui Nota Dinas Direktur POA Nomor 117/DJPSDKP.3/TU.140/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat s.d TW IV Tahun 2025, diperoleh **Indeks operasi kapal pengawas Stasiun PSDKP Cilacap yaitu 96,8 peringkat 2 lingkup UPT Ditjen PSDKP. Namun lebih rendah daripada tahun sebelumnya (97,26).**

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sektor perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.116.718.000,00. Namun meskipun sempat terkena efisiensi anggaran, pada Triwulan IV anggaran efisiensi sudah dapat dipergunakan dan mendapatkan tambahan alokasi anggaran PNBPN, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp2.562.810.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp2.365.064.138,00 atau 92,284%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif

Sasaran Kegiatan 5

IKU 7 – Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	92	92,19	100
--------	-----------	---------	----	-------	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	10*	21	Hari Operasi	210

Operasi speedboat pengawas

Indeks Operasi Speedboat Pengawas adalah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujud pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yaitu:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (bobot 40%). Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan dan/atau 1 objek kelautan per hari;
2. Cakupan wilayah pengawasan (bobot 40%). Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas;
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (bobot 15%);
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (bobot 5%).

Untuk kegiatan ini, *terdapat revisi target dari 21 Hari Operasi menjadi 10 Hari Operasi, yang telah dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA.REV11_Pemutahiran KPA) Tanggal 12 Desember 2025. Namun, sampai tanggal revisi dimaksud, operasi speedboat pengawas sudah mencapai 21 hari operasi.

Selanjutnya melalui Nota Dinas Direktur POA Nomor 117/DJPSDKP.3/TU.140/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat s.d TW IV Tahun 2025, diperoleh **Indeks operasi speedboat pengawas Stasiun PSDKP Cilacap yaitu 92,19 peringkat 12 lingkup UPT Ditjen PSDKP. Namun, lebih rendah dari tahun sebelumnya (97,26).**

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp853.977.000.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp519.238.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp398.296.000,00 atau 46,64% dari pagu total. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp398.291.916,00 atau 99,999%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan 6

IKU 8 – Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarwas SDKP

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	100	100	100
--------	-----------	---------	-----	-----	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	9	9	Unit	100

Armada pengawasan SDKP yang dirawat

Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Cilacap meliputi: 1 (satu) unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan serta 8 (delapan) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat), dengan kegiatan utama pada indikator kinerja ini terdiri dari: 1) Perawatan pencegahan, 2) Perawatan prediktif; serta 3) Perawatan darurat.

Mengingat pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan perawatan pada sarana lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, maka berdasarkan Manual IKU **persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP Cilacap adalah 100% (capaian rata-rata UPT lingkup Ditjen PSDKP dan sama dengan tahun sebelumnya)**, dari formula perhitungan sebagai berikut:

$$Xp = (50\%.xa) + (40\%.xb) + (10\%.xc) = 100\%$$

Dimana:

- Xp : Persentase perawatan sarana
- xa : Preventive
- xb : Predictive
- xc : Darurat

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.134.580.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp255.189.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp879.391.000,00 atau 77,51% dari pagu total. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp879.385.183,00 atau 99,999%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan 7

IKU 9 – Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	81	81	100
--------	-----------	---------	----	----	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	10	10	Perkara	100

Perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif

Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenalan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan. Pada tahun 2025 telah dilakukan pengenalan sanksi administratif SPKP sebanyak 723 kasus (92,87%), dan non SPKP sumber daya kelautan sebanyak 21 kasus (100%) dan non SPKP sumber daya perikanan sebanyak 49 kasus (100%), dengan total sanksi administratif sebanyak 793 kasus (96,43%).

Sehingga berdasarkan persentase sanksi administratif dari keseluruhan kasus yang ada 96,43%, maka **Capaian IKU Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan adalah 81** (*kriteria indeks maksimum persentase 75% – 100%, maka Nilai Indeks maksimum adalah 81*) yang merupakan **capaian rata-rata UPT lingkup Ditjen PSDKP** dan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya (80).

Untuk mencapai indikator Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp300.800.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp218.738.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp82.062.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp82.032.600,00 atau 99,964%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan 7

IKU 10 – Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	81	81	100
--------	-----------	---------	----	----	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	10	10	Perkara	100

Perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam hal dugaan pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pada tahun 2025 telah dilakukan analisis pemantauan indikasi pelanggaran sebanyak 816 laporan, dan seluruhnya telah dilakukan tindak lanjut dengan hasil Bukan Pelanggaran 35 laporan, Surat Pemanggilan 12 laporan, Berita Acara Pemeriksaan 46 laporan, Surat Peringatan/Teguran 720 laporan dan Sanksi Denda Administratif 3 laporan. Sehingga persentase penyelesaian 100%, dan **Capaian IKU Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan adalah 81 yang merupakan capaian rata-rata UPT lingkup Ditjen PSDKP dan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya (80)**, sesuai dengan formula perhitungan manual IKU sebagai berikut:

$$X = \frac{A}{B} = \frac{816}{816} = 100\%, \text{ dengan kriteria indeks maksimum persentase } 75\% - 100\%, \text{ maka Nilai Indeks maksimum adalah } 81$$

Untuk mencapai indikator Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp300.800.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp218.738.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp82.062.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp82.032.600,00 atau 99,964%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan 8

IKU 11 – Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	81	81	100
--------	-----------	---------	----	----	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	1	1	Perkara	100

Perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi pidana

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan IKU yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, didasari oleh tahapan-tahapan proses penyidikan mulai dari tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penyelesaian 1 kasus penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen perizinan sampai penyerahan Tahap II. Sehingga persentase penyelesaian 100%, sehingga **Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan adalah 81 yang merupakan capaian rata-rata UPT lingkup Ditjen PSDKP**, namun tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan target, untuk perhitungan sesuai dengan formula manual IKU sebagai berikut:

$$(xa) = \frac{a}{\Sigma b} = \frac{1}{1} = 100\%, \text{ dengan kriteria indeks maksimum persentase } 75\% - 100\%, \text{ maka Nilai Indeks maksimum adalah } 81$$

Untuk mencapai indikator Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp116.375.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp51.719.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp64.656.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp64.652.500,00 atau 99,995%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Kegiatan 9

IKU 12 – Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	71,5	90,09	120
--------	-----------	---------	------	-------	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	1	1	Dokumen	100
	1	1	Dokumen	100

Layanan pemantauan dan evaluasi
Layanan perencanaan dan penganggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. NKPA dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan aplikasi MONEV KEMENKEU, yaitu sebagai berikut:

- Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja; dan
- Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK).

Selanjutnya melalui Lampiran Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KKP, diperoleh **Nilai kinerja perencanaan anggaran Stasiun PSDKP Cilacap yaitu 90,09 peringkat 4 lingkup UPT Ditjen PSDKP. Namun, nilai ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya yaitu 98,08.**

Untuk mencapai Indikator Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap, telah dialokasikan anggaran kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp139.400.000,00 dan Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp30.800.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini diefisiensi seluruhnya, sehingga tidak ada pagu efektif yang tersedia. **Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak ada realisasi karena tidak ada pagu efektif.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Kegiatan 9

IKU 13 – Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	92	97,8	106
--------	-----------	---------	----	------	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	1	1	Layanan	100
	1	1	Dokumen	100

Layanan manajemen keuangan
Layanan perencanaan dan penganggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu: (1) Capaian Output, (2) Revisi DIPA, (3) Deviasi Halaman III DIPA, (4) Pengelolaan UP dan TUP, (5) Belanja Kontraktual, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) Penyerapan Anggaran, serta (8) Dispensasi SPM, yang dilakukan penarikan data capaian indikator IKPA berdasarkan aplikasi OMSPAN tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.30.

Selanjutnya melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KKP Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025, diperoleh **Nilai IKPA Stasiun PSDKP Cilacap yaitu 97,8 peringkat 1 lingkup UPT Ditjen PSDKP dan lebih tinggi dari nilai pada tahun sebelumnya yaitu 97,56.**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), telah dialokasikan anggaran kegiatan Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp66.850.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp61.640.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp5.210.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp5.210.000,00 atau 100%. Selain itu, terdapat kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran tanpa pagu efektif karena efisiensi seluruh alokasi anggaran.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Kegiatan 9

IKU 14 – Indeks profesionalitas ASN unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
81	84,16	104

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	88	90	Orang	102

Layanan manajemen Sumber Daya Manusia

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN dihitung dari penilaian kualifikasi (bobot 25), kompetensi (bobot 40), kinerja (bobot 30), dan disiplin (bobot 5).

Selanjutnya melalui Nota Dinas Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 22/DJPSDKP.1/TU.210/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Ditjen PSDKP Tahun 2025, diperoleh **Nilai Indeks Profesional ASN Stasiun PSDKP Cilacap dari 90 pegawai yaitu 84,16 peringkat 9 lingkup UPT lingkup Ditjen PSDKP.** Nilai ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya yaitu 87,53.

Untuk mencapai indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap, telah dialokasikan anggaran kegiatan Layanan Manajemen SDM sebesar Rp66.500.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp60.437.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp6.063.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp6.063.000,00 atau 100%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Kegiatan 9

IKU 15 – Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	86	89,45	104
--------	-----------	---------	----	-------	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	1	1	Layanan	100

Layanan reformasi kinerja

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Selanjutnya melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.2409/DJPSDKP.1/RC.510/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Hasil Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Tahun 2025, diperoleh **Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap yaitu 89,45 dengan Predikat A (memuaskan) peringkat 3 lingkup UPT lingkup Ditjen PSDKP.** Dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai ini lebih tinggi, karena hasil Penilaian Mandiri SAKIP tahun 2024 adalah 87,25.

Untuk mencapai indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, telah dialokasikan anggaran kegiatan Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp78.202.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp70.479.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp7.723.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp7.722.000,00 atau 99,987%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Kegiatan 9

IKU 16 – Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis MR Stasiun PSDKP Cilacap

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	100	100	100
--------	-----------	---------	-----	-----	-----

Kegiatan Pendukung (Output/
Komponen/ Subkomponen)

TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
1	1	Layanan	100

Layanan manajemen keuangan

Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Triwulan IV Tahun 2025 diperoleh dari Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) TA 2025 dengan tujuan untuk: 1) memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016; 2) memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan; 3) memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko; dan 4) memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen risiko. Stasiun PSDKP Cilacap memiliki 11 Form Rencana Pengendalian Risiko yang keseluruhannya telah direalisasikan dalam pengendalian risiko.

Selanjutnya melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.145/DJPSDKP.1/OT.710/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2025 Lingkup Ditjen. PSDKP, diperoleh **Persentase capaian IKU Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap yaitu 100% sama untuk semua UPT lingkup Ditjen PSDKP**, dan nilai ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mencapai indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, telah dialokasikan anggaran kegiatan Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp66.850.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp61.640.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp5.210.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp5.210.000,00 atau 100%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Kegiatan 9

IKU 17 – Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	95	100	105
--------	-----------	---------	----	-----	-----

Kegiatan Pendukung (Output/
Komponen/ Subkomponen)

TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
1	1	Layanan	100

Layanan manajemen keuangan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit periode 1 Oktober 2024 s/d 30 September 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025), yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II dan III sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 (Triwulan IV 2025). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Ditjen PSDKP yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100% (tuntas 250 dari 250 rekomendasi).

Selanjutnya melalui Nota Dinas Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 63/DJPSDKP.1/TU.140/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II dan III Lingkup Ditjen PSDKP” periode Triwulan IV Tahun 2025, diperoleh **Persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dan dilengkapi oleh Stasiun PSDKP Cilacap yaitu 100% sama untuk semua UPT lingkup Ditjen PSDKP** dan nilai ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mencapai indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, telah dialokasikan anggaran kegiatan Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp66.850.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp61.640.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp5.210.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp5.210.000,00 atau 100%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Kegiatan 9

IKU 18 – Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	80	94,64	118
--------	-----------	---------	----	-------	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	1	1	Layanan	100

Layanan reformasi kinerja

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survey secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nilai Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi pengukuran indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengguna Layanan Publik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada setiap Triwulan. Hasil penghitungan penilaian SKM dengan menggunakan aplikasi Susan KKP melalui laman <https://ptsp.kkp.go.id/skm/p/home>.

Selanjutnya melalui Nota Dinas Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 75/DJPSDKP.1/HP.430/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Ditjen PSDKP Triwulan IV Tahun 2025, diperoleh **nilai Kepuasan Masyarakat Stasiun PSDKP Cilacap yaitu 94,64 peringkat 5 lingkup Ditjen PSDKP**. Pada tahun sebelumnya indeks kepuasan masyarakat Stasiun PSDKP Cilacap adalah 88,83.

Untuk mencapai indikator kinerja Nilai implementasi program budaya kerja, telah dialokasikan anggaran kegiatan Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp78.202.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp70.479.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp7.723.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp7.722.000,00 atau 99,987%.**

Nilai Kepuasan Masyarakat pada keseluruhan triwulan tahun 2025 ditampilkan sebagai berikut:

TW I	TW II	TW III	TW IV
89,37	92,13	94,44	94,64

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Kegiatan 9

IKU 19 – Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Cilacap

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	75	92,5	120
--------	-----------	---------	----	------	-----

Kegiatan Pendukung (Output/
Komponen/ Subkomponen)

TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
1	1	Layanan	100

Layanan penyelenggaraan kearsipan

Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Cilacap merupakan nilai yang diperoleh dari pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yaitu dilakukannya verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2025.

Selanjutnya melalui Nota Dinas Kepala Biro Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025, diperoleh **nilai kearsipan Stasiun PSDKP Cilacap yaitu 92,5 peringkat 3 lingkup UPT Ditjen PSDKP**. Pada tahun sebelumnya nilai kearsipan Stasiun PSDKP Cilacap adalah 83,36.

Untuk mencapai indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Cilacap, telah dialokasikan anggaran kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan sebesar Rp31.638.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi seluruhnya, **sehingga tidak ada pagu efektif yang tersedia** dan tidak ada realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

Meskipun tanpa alokasi anggaran, selanjutnya dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan, perlu diperhatikan hal-hal antara lain:

1. Tetap melakukan upaya peningkatan kesadaran dan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sesuai ketentuan;
2. Identifikasi, penataan dan penyediaan daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif; dan
3. Melaksanakan program arsip vital organisasi dan membuat daftar arsip vital.

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Kegiatan 9

IKU 20 – Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	77	83,77	109
--------	-----------	---------	----	-------	-----

Kegiatan Pendukung (Output/ Komponen/ Subkomponen)	TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
	1	1	Layanan	100

Layanan reformasi kinerja

Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap merupakan nilai yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 pada 15 s/d 16 Desember 2025 di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV Lantai 15 Jakarta. Lomba inovasi dimaksud telah dilakukan penilaian oleh tim penilai independen. Tim tersebut terdiri atas unsur Akademisi, Praktisi Inovasi, serta Ahli bidang Pengawasan SDKP, dengan penilaian yang dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara objektif dan terukur.

Selanjutnya melalui Nota Dinas Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 2119/DJPSDKP.1/TU.140/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 perihal Hasil Penilaian Lomba Inovasi Ditjen PSDKP, diperoleh **nilai inovasi Stasiun PSDKP Cilacap yaitu 83,77 peringkat 3 lingkup UPT Ditjen PSDKP**. Nilai ini adalah penilaian yang pertama, mengingat indikator sebelumnya adalah jumlah inovasi yang disusun setiap tahunnya. Namun, berdasarkan pelaksanaan lomba inovasi tahun sebelumnya Stasiun PSDKP Cilacap memperoleh peringkat 2 lingkup UPT Ditjen PSDKP.

Untuk mencapai indikator kinerja Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap, telah dialokasikan anggaran kegiatan Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp78.202.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp70.479.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp7.723.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp7.722.000,00 atau 99,987%.**

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Sasaran Kegiatan 9

IKU 21 – Nilai implementasi program Budaya Kerja

TARGET	REALISASI	CAPAIAN	70	88,03	120
--------	-----------	---------	----	-------	-----

Kegiatan Pendukung (Output/
Komponen/ Subkomponen)

TARGET	REALISASI	SATUAN	% CAPAIAN
1	1	Layanan	100

Layanan reformasi kinerja

Nilai implementasi budaya kerja merupakan nilai yang diperoleh dari penerapan program budaya kerja ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan budaya kerja Ditjen PSDKP yaitu PILAR (Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi) pada Stasiun PSDKP Cilacap. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja, dengan nilai budaya kerja yang dilakukan penilaian terdiri dari: (1) Tim Satker; (2) Hasilkan Inovasi Unit Kerja; (3) Lima Menit Sebelum Jadwal; (4) Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin; (5) Upayakan Data Terkini; (6) Organisasikan, Catat, Aksi dan Arsipkan; (7) Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (8) Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (9) ASN PSDKP Produktif Kerja; (10) Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (11) Hargai, Motivasi, dan Inisiatif; serta (12) Gelorakan Gerakan hemat Energi.

Selanjutnya melalui Nota Dinas Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 117/DJPSDKP.1/TU.140/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian LKE Budaya Kerja Unit Kerja Lingkup Ditjen PSDKP, diperoleh **nilai implementasi program Budaya Kerja yaitu 88,03 tertinggi lingkup Ditjen PSDKP.**

Untuk mencapai indikator kinerja Nilai implementasi program budaya kerja, telah dialokasikan anggaran kegiatan Layanan Reformasi Kinerja sebesar Rp78.202.000,00. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran ini turut diefisiensi sebesar Rp70.479.000,00, sehingga pagu efektif yang tersedia adalah sebesar Rp7.723.000,00. **Sampai dengan 31 Desember 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp7.722.000,00 atau 99,987%.**

ANALISIS KEBERHASILAN KINERJA /KEGIATAN

1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Kegiatan pemberian pemahaman pengawasan SDKP kepada Pokmaswas, dapat dilaksanakan dalam efisiensi anggaran karena adanya undangan/permintaan Pokmaswas yang dilaksanakan pada lokasi yang dekat dengan Stasiun PSDKP Cilacap

2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan

Pelaksanaan kegiatan operasi intelijen SDK pada pemanfaatan pulau-pulau kecil mendapatkan kriteria sepenuhnya dan dibenarkan oleh unit kerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan

Pelaksanaan kegiatan operasi intelijen SDP pada distribusi hasil perikanan, memenuhi tahapan intelijen yaitu perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian dan telah ditindaklanjuti hasilnya oleh Stasiun PSDKP Cilacap

4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

Pelaksanaan unit usaha sektor kelautan melalui pengawasan rutin dan pengawasan insidental terhadap 26 Lembaga, dengan pemenuhan tahapan persiapan (surat tugas, surat pemberitahuan), pelaksanaan (form dan BA pengawasan) dan pelaporan.

5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan

Pelaksanaan unit usaha sektor perikanan melalui pengawasan rutin dan pengawasan insidental terhadap 80 Lembaga, dengan pemenuhan tahapan persiapan (surat tugas, surat pemberitahuan), pemeriksaan kesesuaian dan pelaporan yang disampaikan tepat waktu.

6. Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)

Pencapaian 60 hari operasi karena operasi kapal pengawas dilakukan dengan putaran mesin/RPM rendah sehingga hemat bahan bakar dan hari operasi dapat bertambah. Apabila menggunakan RPM tinggi maka target hari operasi tidak akan tercapai.

7. Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)

Pelaksanaan operasi speedboat dilaksanakan berdasarkan perencanaan operasi, pemetaan kondisi armada dan personil, dan optimalisasi armada speedboat di seluruh unit kerja Stasiun PSDKP

8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP

Telah dilakukan pemetaan kondisi teknis seluruh armada pengawasan berdasarkan Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis) setiap bulan; Pelaksanaan kegiatan perawatan rutin sarana dan prasarana pengawasan SDKP sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap bulannya, agar selalu dalam performa terbaik dan apabila terdapat kerusakan dapat dideteksi lebih awal; Penyusunan mekanisme untuk perawatan darurat (kerusakan tidak terduga) untuk kapal pengawas dan speedboat.

9. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)

Penerapan sanksi administratif SPKP sebanyak 723 kasus (92,87%), dan non SPKP sumber daya kelautan sebanyak 21 kasus (100%) dan non SPKP sumber daya perikanan sebanyak 49 kasus (100%), dengan total sanksi administratif sebanyak 793 kasus (96,43%).

10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)

Telah dilakukan analisis pemantauan indikasi pelanggaran sebanyak 816 laporan, dan seluruhnya telah dilakukan tindak lanjut dengan hasil Bukan Pelanggaran 35 laporan, Surat Pemanggilan 12 laporan, Berita Acara Pemeriksaan 46 laporan, Surat Peringatan/Teguran 720 laporan dan Sanksi Denda Administratif 3 laporan.

11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)

Telah dilaksanakan penyelesaian 1 kasus penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen perizinan sampai penyerahan Tahap II, yang telah didasari oleh tahapan-tahapan proses penyidikan mulai dari tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai karena berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

ANALISIS KEBERHASILAN KINERJA /KEGIATAN

12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output serta realisasi anggaran pada RO SBKK atau SBKU untuk mencapai nilai efisiensi SBK yang maksimal, dengan penyebab keberhasilan pencapaian indikator yaitu:

- Kepatuhan pengelola keuangan dan Tim Kerja Stasiun PSDKP Cilacap dalam pelaporan capaian output kepada KPPN setiap bulannya;
- Penggunaan standar biaya keluaran (SBK) yang sesuai dengan aturan, sehingga poin ini memberikan sumbangsih tinggi pada penilaian NKPA.

13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu (1) melakukan revisi DIPA untuk menyesuaikan terhadap perubahan pada kebijakan program/kegiatan, (2) menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai rencana pelaksanaan kegiatan untuk menjaga deviasi pada Halaman III DIPA, (3) memaksimalkan penyerapan anggaran dengan tetap mengutamakan efisiensi, menaati ketentuan belanja kontraktual, (5) melakukan penyelesaian tagihan secara tepat waktu, (6) melakukan pengusulan revolving GUP, (7) melakukan pengisian capaian output pada modul Komitmen SAKTI secara tepat waktu setiap bulannya, serta (8) menghindari adanya dispensasi SPM.

menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

- Kepatuhan pengelola keuangan Stasiun PSDKP Cilacap dalam mematuhi kaidah-kaidah penganggaran dan belanja yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- Koordinasi antar Tim Kerja dalam melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan termasuk juga perencanaan penganggaran utamanya dalam hal Rencana Penarikan Dana (RPD).

14. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)

Untuk mencapai kegiatan ini, ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap telah mengikuti kegiatan bimtek/seminar/workshop/pelatihan dengan hasil sertifikat yang kemudian diupload pada my ASN sebagai bahan penilaian indeks profesionalitas.

15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Pelaksanaan seluruh komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi) telah terlaksana dengan baik dan menunjukkan pelaksanaan good Governance dan telah dilaksanakannya pemantauan oleh Eselon II pembina teknis terhadap pelaksanaan SAKIP di UPT Stasiun PSDKP Cilacap.

16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Penyusunan matrik manajemen risiko atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 berdasarkan frekuensi dan dampak risiko yang telah dilaksanakan dan langkah mitigasi risikonya.

17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Pelaksanaan tindak lanjut pengawasan yang dilaksanakan oleh Itjen KKP, berupa pemenuhan kelengkapan dokumen atau penjelasan/justifikasi atas hasil pengawasan.

18. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Pelayanan publik yang diberikan setiap hari meskipun hari libur dan pendampingan penjelasan terkait alur pelayanan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengguna layanan, serta adanya inovasi dalam pelayanan.

19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Pelaksanaan pengelolaan kearsipan yang memperhatikan peningkatan kesadaran dan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sesuai ketentuan.

20. Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)

Menyusun inovasi dan memantau implementasinya sesuai dengan standar yang ditetapkan Komite Budaya Kerja, sehingga pada saat dilaksanakan penilaian dalam perlombaan inovasi mendapatkan nilai di atas target.

21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

Stasiun PSDKP Cilacap telah menerapkan Budaya Kerja PILAR PSDKP dan ASN Berakhlak dengan implementasi yang tercatat, tersisip dan terdokumentasi, sehingga pada saat dilaksanakan penilaian Lembar Kerja Evaluasi mampu menyajikan data dukung yang diperlukan.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN TAHUN 2025 DAN TAHUN 2024

Pada tahun 2025 dengan 9 Sasaran Kegiatan yang memiliki **21** Indikator Kinerja Utama (IKU), Stasiun PSDKP Cilacap berhasil merealisasikan target yang ditetapkan dengan hasil:

15 IKU memiliki nilai capaian 90 - <110 (baik); dan
6 IKU memiliki nilai capaian 110 – 120 (Istimewa).

2025 1

Sehingga atas capaian ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2025 adalah sebesar **106,8% (baik)**, dengan realisasi anggaran sebesar 99,11%.



NKO 2025

><



NKO 2024

Sedangkan pada tahun 2024 dengan 8 Sasaran Kegiatan yang memiliki **24** Indikator Kinerja Utama (IKU), Stasiun PSDKP Cilacap berhasil merealisasikan target yang ditetapkan dengan hasil:

14 IKU memiliki nilai capaian 90 - <110 (baik); dan
10 IKU memiliki nilai capaian 110 – 120 (Istimewa).

2024 2

Sehingga atas capaian ini, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2025 adalah sebesar **105,78% (baik)**, dengan realisasi anggaran sebesar 99,92%.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RENCANA STRATEGIS DI TAHUN 2025



Pelaksanaan kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan sinergi yang kuat dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PSDKP 2025–2029, dengan poin:

1. Keselarasan Target Strategis dan Realisasi;
2. Efisiensi Operasional di Tengah Efisiensi Anggaran;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

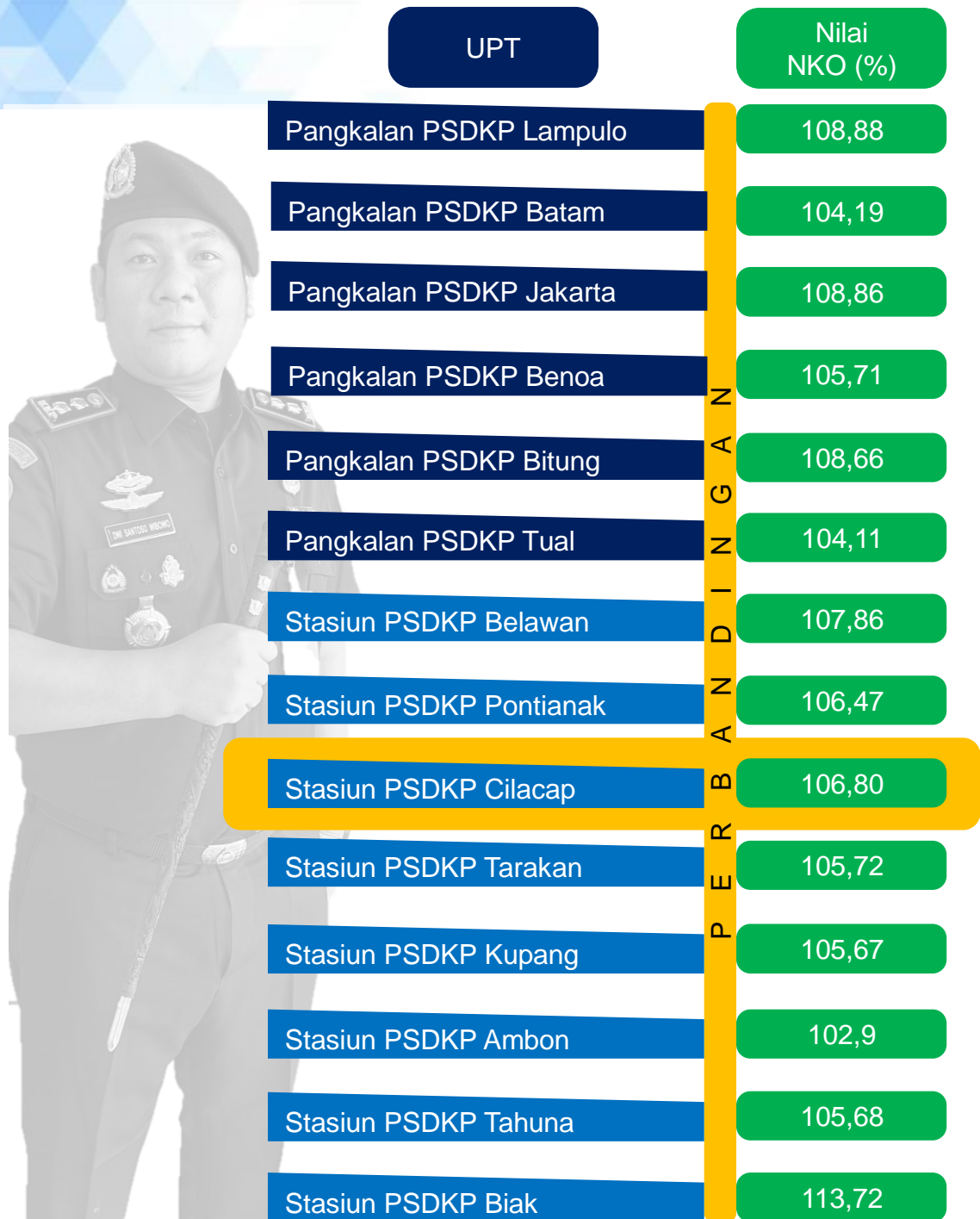
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RENCANA STRATEGIS JANGKA MENENGAH (2029)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2029	REALISASI 2025
1 Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	86	100
	2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif		
2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100
	3. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100
3 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	86	88,3
	4 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan		
4 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	86	100
	5 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif		
5 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas	93	96,8
	7. Indeks operasi speedboat pengawas	93	92,19
6 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	100
	7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		
7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	85	81
	10. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	85	81
8 Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	85	81
	9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		
9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	82,5	90,09
	13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	92,2	97,8
9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap	83	84,16
	15. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	88,8	89,45
9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap	100	100
	17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	89	100
9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	18. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	89,5	94,64
	19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap	84	92,5
9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	20. Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap	80	83,77
	21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	74	88,03

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN UNIT KERJA LAIN

04

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025.



ANALISIS KEBERHASILAN KINERJA

05

Berikut adalah poin-poin utama analisis keberhasilan kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun Anggaran 2025:

Pencapaian target berbasis output dan outcome, dengan penentuan skala prioritas/ urgensi pelaksanaan kegiatan/ pengawasan SDKP



SAKIP

89,45

Nilai Kinerja
Perencanaan Anggaran

90,09



Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran

97,8

- Efektifitas pelaksanaan kegiatan di tengah efisiensi anggaran dengan performa Value for Money
- Keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan

- Inovasi layanan dan digitalisasi tindak lanjut pengawasan
- Pengintegrasian data hasil pengawasan SDKP



Nilai Inovasi
Pelayanan Publik

83,77

Indeks Profesionalitas
ASN

84,16

Nilai Kepuasan
Masyarakat

94,64



- Sinergi pelaksanaan kegiatan bersama unit kerja lain dan/atau pemerintah daerah
- Peningkatan kualitas layanan publik

ANALISIS EFISIENSI PENGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Stasiun PSDKP Cilacap untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 menunjukkan keberhasilan unit kerja dalam mengelola keterbatasan menjadi peluang produktivitas. Strategi ini menjadi faktor kunci dalam mencapai target kinerja meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

EFISIENSI ANGGARAN

- Peningkatan produktivitas anggaran untuk mencapai target kegiatan dan target kinerja yang ditetapkan.
- Peningkatan rasio efisiensi penggunaan anggaran dengan pendekatan satu anggaran untuk merealisasikan beberapa kegiatan.

EFISIENSI SDM

- Peningkatan kompetensi dan kualitas hasil kerja, serta adaptifitas personil dalam pelaksanaan tugas.
- Menerapkan sistem multitasking bagi personil melalui pelatihan/sharing session, sehingga memungkinkan satu pegawai menguasai beberapa bidang teknis.

EFISIENSI SUMBER DAYA

EFISIENSI METODOLOGI

- Implementasi Desktop Analisis menggunakan data citra satelit dan aplikasi penerbitan perizinan dalam pengawasan SDKP.
- Penguatan peran dan fungsi intelijen pengawasan SDKP.
- Peningkatan aplikasi internal (SINTESA dan TEMAN SLO) untuk menindaklanjuti hasil pengawasan SDP.

EFISIENSI OPERASIONAL DAN FASILITAS

- Operasional kapal pengawas dengan kecepatan rotasi mesin rata-rata 1000 RPM agar hemat bahan bakar, meskipun menjadikan waktu operasi lebih lama, namun tetap efektif dengan target pengawasan pada titik-titik prioritas aktivitas kapal perikanan.
- Perawatan rutin mandiri sarana pengawasan dan optimalisasi kendaraan operasional, serta efisiensi energi listrik.
- Optimalitas prasarana negara dalam mendukung kegiatan rapat, sosialisasi dan penyadartahuan.
- Digitalisasi dokumen penerbitan SLO dan HPKD.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

KEGIATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

- Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan SDKP dengan efektifitas fokus pada lokasi yang terjangkau pada wilayah kantor administrasi unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap.
- Penguatan sinergi dengan unit kerja lain dalam pemberian pemahaman kepada stakeholder pemanfaat SDKP untuk memenuhi ketentuan perundangan dalam kegiatan usaha.
- Percepatan analisis teknis dan yuridis sebagai tindak lanjut hasil pengawasan SDKP.
- Penerapan skala prioritas pengawasan SDKP sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kesiapan Polsus PWP3K/Pengawas Perikanan.

KEGIATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

KEGIATAN SARANA PRASARANA

- Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas di area WPP 712 pada titik-titik aktivitas kapal perikanan dengan pergerakan kapal saat patroli menggunakan kecepatan putaran mesin rata-rata 1000 RPM untuk efisiensi penggunaan bahan bakar.
- Optimalisasi armada speedboat pengawas di seluruh unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap yang mampu dipergunakan untuk operasi pengawasan.
- Kontinuitas perawatan rutin armada pengawasan SDKP di seluruh unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap.

KEGIATAN PENANGANAN PELANGGARAN

- Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana maupun sanksi administratif yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil laporan pengawasan
- Penggunaan sistem dalam tindak lanjut hasil analisis pemantauan indikasi pelanggaran kapal perikanan, serta pengenaan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis.

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJERIAL

- Tata kelola sumber daya baik SDM, anggaran, dan fasilitas dalam memberikan pondasi agar operasional kegiatan pengawasan SDKP, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan perencanaan dan penganggaran, layanan manajemen, reformasi kinerja, kearsipan, dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar.
- Kontrol melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan dapat dilaksanakan dengan cepat, serta tidak ada deviasi antara rencana dan realisasi.

REALISASI ANGGARAN

RP **DIPA AWAL**

Nomor DIPA: SP DIPA-032.05.2.031665/2025 tanggal 2 Desember 2024
Total Pagu Awal Rp25.100.761.000,00

RP **DIPA REVISI**

Melalui 11 Proses Revisi selama TA 2025, terakhir 12 Desember 2025
Total Pagu Revisi Rp22.524.907.000,00

Dari Pagu Revisi, Terdapat Blokir sebesar **Rp272.317.000,00**

sehingga Pagu Efektif hanya sebesar **Rp22.252.590.000,00**

Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar **Rp22.053.939.366,00** atau **99,11%**
(dari pagu efektif)

Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap TA 2025

Kode	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Jenis Belanja/ Rincian Belanja	Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Pagu Efektif (%)	Sisa Pagu Efektif (Rp)
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	4.105.275.000	3.840.497.000	3.642.741.237	94,85	197.755.763
2351	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000	146.718.000	146.685.100	99,98	32.900
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.254.537.000	465.937.000	465.856.992	99,98	80.008
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan Sektor Kelautan dan Perikanan*	1.300.000.000*	0	0	0	0
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	17.973.774.000	17.799.438.000	17.798.656.037	100	781.963
TOTAL		25.100.761.000	22.252.590.000	22.053.939.366	99,11	*198.650.634

Sumber: Omspan Stasiun PSDKP Cilacap per tanggal 31 Desember 2025

*sisa pagu efektif adalah tambahan anggaran PNBPN pada Triwulan IV, apabila realisasi anggaran dihitung tanpa tambahan PNBPN, maka realisasi anggaran adalah 99,996%

BAB 4. PENUTUP

01

KESIMPULAN

Kesimpulan umum atas capaian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025 dari total 21 (dua puluh satu) IKU, target IKU telah tercapai secara keseluruhan, dengan rincian 7 (tujuh) IKU tercapai sesuai target dan 14 (empat belas) IKU di atas target yang ditetapkan.

2

Dari pengukuran 21 (dua puluh satu) IKU dimaksud, tercapai dengan hasil nilai realisasi berkisar pada 90% - <110% atau masuk kategori baik (berwarna hijau) sebanyak 15 (lima belas) IKU dan berkisar 110% – 120% atau masuk kategori istimewa (berwarna biru) sebanyak 6 (enam) IKU.

3

Atas hasil penilaian terhadap 21 (dua puluh satu) IKU tersebut didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2025 adalah sebesar 106,8. Nilai ini lebih lebih tinggi 1,02 poin jika dibandingkan dengan NKO pada tahun 2024 yaitu sebesar 105,78 dan sama dengan rata-rata NKO unit kerja UPT Stasiun lingkup Ditjen PSDKP) yaitu 106,80 atau peringkat 6 dalam UPT lingkup Ditjen PSDKP.

4

Untuk mencapai capaian kinerja pada tahun 2025, telah didukung dengan realisasi anggaran Stasiun PSDKP Cilacap berdasarkan pagu efektif (tanpa blokir) sebesar Rp22.053.939.366,00 atau 99,11%, dengan sisa anggaran Rp198.650.634,00 (yang berasal dari tambahan anggaran PNBPN). Apabila dihitung tanpa tambahan anggaran PNBPN, maka penyerapan anggaran mencapai 99,99%

02

SARAN

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dimaksud, dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun anggaran 2026, maka direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1

Agar masing-masing Tim Kerja menyusun perencanaan (rencana aksi) dan melaksanakan kegiatan khususnya pengawasan yang optimal sejak bulan pertama (Januari) tahun 2026, mengingat penambahan target kegiatan pengawasan dan antisipasi adanya efisiensi anggaran, agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

2

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atau setiap triwulan untuk memantau capaian target kegiatan yang ditetapkan/menyusun evaluasi rencana aksi yang dilaksanakan masing-masing Tim Kerja.

BAB 5. LAMPIRAN

01

PENGHARGAAN

No	Instansi Pemberi Penghargaan	Peringkat	Jenis Penghargaan
1	Ditjen PSDKP	1	Lomba Kebersihan Lingkup UPT Ditjen PSDKP
2	Ditjen PSDKP	3	Lomba Inovasi Lingkup UPT Ditjen PSDKP
3	Biro Umum KKP	3	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal KKP Lingkup UPT Ditjen PSDKP
4	KKP	-	Unit Organisasi berpredikat INFORMATIF



BAB 5. LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL dj@medan.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Santoso Wibowo
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap

Pung Nugroho Saksono

Dwi Santoso Wibowo

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	7.126.987.000
a.	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	4.105.275.000
b.	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000
c.	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.254.537.000
d.	Pencegahan Pelanggaran dan Penyedartahuan Sektor Kelautan dan Perikanan	1.300.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	17.973.774.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025		25.100.761.000

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap

Pung Nugroho Saksono

Dwi Santoso Wibowo



PERJANJIAN KINERJA

- 9 Sasaran Kegiatan
- 21 IKU

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan pokmaswas (Indeks)	82
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
	3 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
	5 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	6 Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
	7 Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
	9 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
	11 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	94
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	71,5
	13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	92
9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)	81
	15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	86
16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)	16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
18. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	88,5
	19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	80
20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)	20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)	1
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

BAB 5. LAMPIRAN

03

REVISI PERJANJIAN
KINERJA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL djstpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Santoso Wibowo
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksiono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksiono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap

Dwi Santoso Wibowo

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	4.453.152.000
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	3.840.497.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	146.718.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	465.937.000
2.	Program Dukungan Manajemen	18.071.755.000
	Total Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025	22.524.907.000

Jakarta, 15 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksiono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap

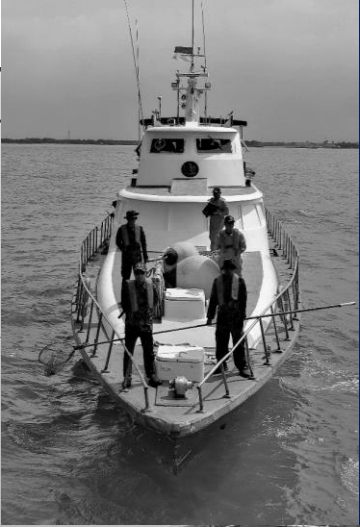
Dwi Santoso Wibowo

- Revisi berdasarkan adanya perubahan Renstra Ditjen PSDKP, yang telah dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA.REV11_Pemutahiran KPA Tanggal 12 Desember 2025)
- Terdapat perubahan IKU dan/atau target IKU dari beberapa IKU yang ada

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan pokmaswas (Indeks)	82
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
	3 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
	4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas	92
	7 Indeks operasi speedboat pengawas	92
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100
	7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan		81
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
	9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, linch dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap
13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap		92
14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap		81
15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap		86
16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap		100%
17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan		95%
18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
	19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap	75
	20 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap	77
21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	

STASIUN PSDKP CILACAP



BERGERAK BERDAMPAK BERKELANJUTAN





STASIUN PSDKP CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2025